



Honesty in Language in Public Figures' Narratives in Tempo Magazine: A Forensic Linguistic Study

Muhammad Musawir

muhammad.musawir@unm.ac.id

Fakultas Bahasa dan Sastra, Universitas Negeri Makassar, Makassar, Indonesia

ABSTRACT

This study aims to analyze the level of linguistic honesty in public-figure narratives published in Tempo Magazine articles, employing the Statement Analysis in Linguistics (SAL) forensic-linguistic model developed by John Olsson. The investigation arises from concerns about public figures' communication practices, which are often laden with manipulation when addressing legal cases—such as the “special fugitive” scandal. Using a qualitative-descriptive method, the study examines six narratives by public figures (including Anita Kolopaking, Yasonna Laoly, and Listyo Sigit Prabowo) based on three indicators: narrative structure, sequence of events, and association of the narrator with events. The analysis reveals varying levels of honesty: some narratives exhibit a coherent structure and high personal involvement, while others show signs of deception—such as excessive justification, inconsistent pronoun use, and convoluted narrative flow. These findings demonstrate that a forensic-linguistic approach is effective in identifying linguistic manipulation in public discourse and can serve as an evaluative instrument for assessing the integrity of public figures' communication.

Keywords: honesty in language; forensic linguistics; public-figure narratives; Tempo Magazine; Statement Analysis in Linguistics

PENDAHULUAN

Kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) seperti korupsi merupakan persoalan serius yang tidak hanya menggerogoti struktur ekonomi, tetapi juga merusak sendi-sendi kehidupan sosial, politik, dan hukum di Indonesia. Kejahatan ini dikategorikan sebagai luar biasa karena pembuktiannya yang sulit dan dampaknya yang sangat luas hingga mampu menyebabkan kemiskinan struktural di masyarakat (Muhammad, 2019). Dalam konteks hukum nasional, berbagai bentuk ketidakjujuran dan manipulasi informasi oleh tokoh-tokoh publik kerap menjadi bagian dari dinamika kasus kejahatan luar biasa. Oleh karena itu, kejujuran berbahasa menjadi elemen krusial dalam penegakan hukum yang berkeadilan.

Salah satu kasus yang menjadi sorotan publik luas adalah skandal pengalihan hak tagih (*cessie*) Bank Bali, yang melibatkan tokoh pengusaha berinisial DT. Ia sempat menjadi buron selama lebih dari satu dekade sebelum akhirnya kembali ke Indonesia dan dengan mudah mengakses berbagai layanan publik seperti pembuatan KTP elektronik, perpanjangan paspor, dan administrasi hukum lainnya (Media, 2020a–2020e). Perlakuan istimewa yang diterimanya menimbulkan pertanyaan besar dari masyarakat mengenai integritas lembaga penegak hukum dan kejujuran narasi yang disampaikan oleh pejabat negara yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam kasus ini.

Majalah *Tempo* sebagai salah satu media yang dikenal kritis, telah memuat berbagai narasi tokoh publik terkait kasus ini. Narasi-narasi tersebut tidak hanya menjadi bagian dari upaya informasi kepada publik, tetapi juga mencerminkan strategi komunikasi yang berpotensi menutupi atau mengaburkan fakta. Dalam situasi seperti ini, linguistik forensik menjadi pendekatan yang relevan untuk menelaah narasi tersebut secara ilmiah. Linguistik forensik adalah cabang ilmu yang mengkaji penggunaan bahasa dalam konteks hukum, termasuk dalam proses hukum dan sebagai alat bukti hukum (Coulthard et al., 2016; Olsson & Luchjenbroers, 2014).

Kajian linguistik forensik berfokus pada analisis terhadap teks atau tuturan yang memiliki relevansi hukum, baik berupa dokumen resmi, transkrip wawancara, maupun artikel media. Dalam konteks ini, narasi tokoh publik yang termuat dalam artikel Majalah *Tempo* dapat dianalisis menggunakan model *Statement Analysis in Linguistics* (SAL) yang dikembangkan oleh John Olsson (2008). Model ini menelaah tingkat kejujuran sebuah narasi berdasarkan tiga aspek utama, yaitu *narrative structure*, *sequence of events*, dan *association of narrator with events*. Setiap aspek dapat mengungkap indikasi ketidakjujuran seperti struktur kalimat yang berbelit, alur yang tidak logis, atau penggunaan bahasa yang menjauhkan narator dari peristiwa yang diceritakan.

Narasi yang jujur umumnya ditandai oleh kesederhanaan, ketepatan, dan keterhubungan yang kuat antara penutur dan peristiwa yang dituturkan. Sebaliknya, narasi yang rumit, tidak runtut, atau terlalu formal bisa menjadi indikator adanya upaya untuk menutupi kebenaran atau mengaburkan informasi (Olsson, 2008). Contoh nyata dapat ditemukan dalam pernyataan Anita Kolopaking, kuasa hukum DT, yang dalam wawancara menyatakan bahwa dirinya tidak mengetahui kapan DT datang ke Jakarta, namun pernyataan tersebut disampaikan tanpa subjek yang jelas dan dengan nada yang tampak ragu. Ketidakhadiran subjek dalam pernyataan seperti ini bisa mencerminkan rendahnya *speaker commitment* terhadap informasi yang disampaikan.

Kejujuran berbahasa dalam konteks publik seperti ini bukan hanya persoalan etis, tetapi juga berdampak langsung terhadap persepsi masyarakat terhadap keadilan hukum. Maka dari itu, sangat penting untuk menelaah apakah narasi tokoh publik yang dimuat dalam media, termasuk Majalah *Tempo*, mengandung indikasi kejujuran atau justru mencerminkan strategi *distancing* untuk menghindari keterlibatan langsung dengan skandal yang terjadi. Dengan menelaah struktur naratif dan pola kebahasaan, kita dapat memperoleh pemahaman yang lebih objektif terhadap posisi dan motivasi narator.

Urgensi penelitian ini juga diperkuat oleh kenyataan bahwa kajian linguistik forensik, khususnya yang berkaitan dengan kejujuran berbahasa, masih sangat terbatas di Indonesia. Padahal, fenomena kebahasaan yang berkembang di ruang publik dewasa ini semakin sering bersinggungan dengan persoalan hukum, mulai dari ujaran kebencian, penipuan daring, hingga pembentukan opini publik oleh pejabat negara (Sholihatin, 2019; Susanto & Nanda, 2020). Oleh karena itu, pendekatan linguistik forensik menawarkan perspektif ilmiah yang dapat memperkuat analisis terhadap wacana-wacana publik yang memiliki konsekuensi hukum dan sosial.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kejujuran berbahasa dalam narasi tokoh publik yang dimuat dalam artikel Majalah *Tempo*, menggunakan pendekatan linguistik forensik model SAL. Melalui analisis ini, diharapkan dapat diungkap sejauh mana narasi-narasi tersebut mencerminkan kejujuran atau justru merupakan bentuk penyangkalan dan manipulasi wacana. Temuan dari penelitian ini tidak hanya akan memperkaya khazanah akademik di bidang linguistik forensik, tetapi juga memberikan kontribusi praktis dalam mengembangkan literasi hukum dan kebahasaan di kalangan masyarakat luas.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena sesuai untuk menggambarkan, memahami, dan menganalisis fenomena kebahasaan secara mendalam berdasarkan data berupa teks narasi tokoh publik dalam artikel Majalah *Tempo*. Menurut Mahsun (2018), penelitian kualitatif deskriptif memusatkan perhatian pada makna, konteks, dan kualitas data, bukan pada pengukuran numerik. Dalam konteks ini, peneliti berusaha mendeskripsikan kejujuran berbahasa para tokoh publik dengan menggunakan prinsip-prinsip linguistik forensik, khususnya model *Statement Analysis in Linguistics* (SAL) yang dikembangkan oleh Olsson (2008).

Sumber data dalam penelitian ini adalah narasi-narasi tokoh publik yang dimuat dalam artikel pemberitaan Majalah *Tempo* yang membahas skandal buron istimewa. Terdapat tiga artikel utama yang digunakan sebagai bahan analisis, yaitu “Bohong Jika Pemerintah Tak Tahu Djoko di Malaysia” dan “Bagaimana Bisa Kebobolan?” dari edisi 11 Juli 2020 serta “Saya Tidak Pernah Berpikir Menjadi Kapolri” dari edisi 22 Agustus 2020. Tokoh publik yang narasinya dianalisis antara lain Anita Kolopaking (pengacara DT), Jhoni Ginting (Dirjen Imigrasi Kemenkumham RI), Zudan Arif Fakrulloh (Dirjen Dukcapil Kemendagri RI), Yasonna Laoly (Menteri Hukum dan HAM RI), dan Listyo Sigit Prabowo (Kepala Bareskrim POLRI).

Pengumpulan data dilakukan dengan metode dokumentasi, yakni menelusuri dan menyalin artikel-artikel yang memuat narasi tokoh-tokoh publik terkait kasus buron istimewa. Setiap narasi yang relevan kemudian ditranskrip, diidentifikasi, dan diklasifikasikan berdasarkan identitas narator dan topik narasi. Peneliti hanya memilih bagian narasi yang mengandung elemen pengakuan atau penyangkalan, yang berpotensi dianalisis kejujurannya berdasarkan indikator linguistik tertentu. Teknik ini memungkinkan peneliti memperoleh potongan-potongan wacana yang relevan sebagai unit analisis.

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis wacana forensik dengan berpedoman pada model SAL. Model ini menilai kejujuran berbahasa berdasarkan tiga indikator utama, yaitu: (1) *narrative structure*, yang merujuk pada kelengkapan unsur narasi seperti subjek, predikat, keterangan waktu, dan tempat; (2) *sequence of events*, yaitu kelogisan dan kronologi rangkaian peristiwa yang dituturkan narator; dan (3) *association of narrator with events*, yakni sejauh mana narator melibatkan dirinya dalam peristiwa melalui penggunaan deskripsi personal dan struktur kalimat (Olsson, 2008). Analisis dilakukan secara induktif, di mana setiap segmen teks diperiksa, ditandai, dan dibandingkan dengan karakteristik narasi yang jujur maupun tidak jujur menurut indikator tersebut.

Dalam proses analisis, peneliti membedah setiap potongan narasi dengan mencari pola linguistik seperti pemilihan kata, struktur sintaksis, penggunaan pronomina, serta keberadaan atau ketiadaan informasi kunci. Narasi yang menggunakan struktur yang ringkas, runtut, dan menunjukkan komitmen narator terhadap isi narasinya dikategorikan sebagai jujur (*associative*), sedangkan narasi yang berbelit-belit, penuh dengan eufemisme, atau tampak menjauhkan narator dari peristiwa cenderung dikategorikan sebagai tidak jujur (*distancing*) (Olsson, 2008).

Untuk menjamin keabsahan data, peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber dan *peer debriefing*. Triangulasi dilakukan dengan membandingkan narasi antarartikel Majalah *Tempo* yang mengangkat topik serupa guna melihat konsistensi dan keselarasan informasi. Sementara itu, *peer debriefing* dilakukan dengan melibatkan rekan sejawat atau dosen pembimbing yang berkompeten di bidang linguistik forensik untuk menelaah ulang hasil analisis dan memastikan interpretasi yang dilakukan tetap dalam koridor ilmiah. Peneliti juga

menerapkan prinsip *audit trail*, yaitu mencatat seluruh proses analisis dan keputusan-keputusan penting yang diambil selama proses penelitian agar dapat ditelusuri kembali jika diperlukan.

Dengan metodologi yang terstruktur dan sistematis ini, diharapkan hasil penelitian dapat memberikan deskripsi yang valid dan reliabel tentang kejujuran berbahasa dalam narasi tokoh publik yang dimuat dalam Majalah *Tempo*, serta berkontribusi dalam pengembangan analisis linguistik dalam konteks hukum di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kejujuran Berbahasa Berdasarkan Aspek Narrative Structure

Aspek pertama yang dianalisis dalam penelitian ini adalah *narrative structure*, yang mencakup elemen subjek, predikat, keterangan waktu, dan tempat. Menurut Olsson (2008), narasi yang jujur memiliki struktur yang utuh, konsisten, dan disampaikan dengan bentuk bahasa yang sederhana serta logis. Dalam narasi yang disampaikan oleh tokoh publik dalam artikel Majalah *Tempo*, ditemukan variasi tingkat kejujuran berdasarkan kelengkapan struktur ini.

Sebagai contoh, dalam artikel berjudul *Bohong Jika Pemerintah Tak Tahu Djoko di Malaysia* (*Tempo*, 11 Juli 2020), Anita Kolopaking menceritakan diskusinya bersama kliennya terkait rencana kepulangan kliennya ke Indonesia. Pengakuan tersebut dapat dilihat dalam data berikut.

Data 1

“Awalnya beliau tak mau pulang ke Indonesia. Saya bujuk karena untuk mendaftarkan permohonan peninjauan kembali harus datang langsung ke pengadilan. Lalu Pak Djoko bilang akan mengecek dokumen dan kelengkapan perjalanan. Di situ beliau mengatakan sudah tak masuk red notice sejak 2014. Barulah Pak Djoko yakin untuk masuk ke Indonesia.”

Pernyataan yang disampaikan oleh narator, dalam hal ini Anita, mengandung indikasi penting terkait dengan validitas informasi serta konsistensi narasi, yang dapat dianalisis melalui perspektif linguistik forensik. Kalimat *“Di situ beliau mengatakan sudah tak masuk red notice sejak 2014”* mengandung problematika dalam hal koherensi faktual dan logika peristiwa. Jika tokoh publik yang dimaksud (DT) menyatakan bahwa dirinya tidak lagi masuk dalam *red notice* sejak tahun 2014, maka muncul pertanyaan kritis: dari mana sumber informasi tersebut diperoleh, mengingat status *red notice* merupakan informasi rahasia yang tidak dapat diakses secara bebas oleh publik, terlebih oleh individu yang sedang dalam pelarian. Dengan demikian, pernyataan tersebut membuka ruang kecurigaan atas kemungkinan keterlibatan pihak-pihak tertentu yang memberikan informasi secara tidak resmi, atau bahkan adanya rekayasa dalam konstruksi narasi untuk menutupi strategi kepulangan.

Lebih lanjut, ketidakkonsistenan penggunaan pronomina dalam narasi, yakni peralihan antara “beliau” dan “Pak Djoko”, mencerminkan ketidakterpaduan naratif dan potensi *manipulasi diskursif*. Secara pragmatik, penggunaan pronomina “beliau” biasanya dimaknai sebagai bentuk penghormatan, sedangkan penyebutan langsung nama “Pak Djoko” bersifat lebih netral atau objektif. Pergeseran ini dapat diinterpretasikan sebagai upaya tidak sadar dari narator untuk menyampaikan pesan yang ambigu—baik dalam bentuk penghormatan maupun distansi emosional. Dalam konteks *analisis linguistik forensik*, ketidakkonsistenan semacam ini kerap dikaitkan dengan *cognitive load* atau beban kognitif yang meningkat saat individu menyampaikan informasi yang tidak sepenuhnya jujur atau sedang dalam posisi menyembunyikan kebenaran.

Secara keseluruhan, narasi dalam data ini menunjukkan indikator tingkat kejujuran yang rendah. Hal tersebut tercermin dari dua aspek utama: (1) ketidakwajaran dalam urutan logis peristiwa dan sumber informasi, serta (2) ketidakstabilan penggunaan referensi persona dalam

narasi. Dalam *forensic statement analysis*, inkonsistensi dan ambiguitas semacam ini kerap dikategorikan sebagai bentuk *verbal leakage*—yaitu kebocoran informasi non-verbal yang mengindikasikan adanya upaya manipulatif atau ketidaksesuaian antara pernyataan verbal dan kondisi sebenarnya.

Sebaliknya, dalam narasi lain yang muncul dalam tayangan artikel berjudul *Bagaimana Bisa Kebobolan?* (11 Juli 2020), Yasonna mengakui bahwa petugas Imigrasi tidak mengetahui bahwa DT adalah seorang buronan. Pengakuan tersebut dapat dilihat dalam data berikut.

Data 2

“Nama Djoko Tjandra itu ada banyak. Petugas di depan yang melayani tidak mengenali. Petugas pelayanan paspor itu kan anak baru, diangkat jadi PNS tahun 2017–2018. Tidak mungkin tahulah siapa itu Djoko Tjandra. Kami sudah memeriksa petugas itu. Kesimpulannya, dia sudah memenuhi prosedur.”

Pernyataan yang disampaikan oleh Yasonna mengandung narasi pembelaan terhadap integritas institusi serta individu petugas yang terlibat dalam pelayanan administrasi terhadap Djoko Tjandra. Secara struktural, narasi ini disusun secara koheren dan linier, dimulai dari deskripsi situasi umum (“Nama Djoko Tjandra itu ada banyak”) hingga penyampaian fakta yang dianggap mendukung pembelaan (“Kesimpulannya, dia sudah memenuhi prosedur”). Dari sudut pandang *linguistik forensik*, struktur naratif seperti ini cenderung menunjukkan tingkat kejujuran yang lebih tinggi karena tidak mengandung penyimpangan sintaksis maupun semantik yang signifikan, serta minim tanda-tanda linguistik dari *deceptive language*.

Keterangan waktu yang digunakan, yakni “tahun 2017–2018”, memperlihatkan upaya pembicara untuk menegaskan kredibilitas narasi melalui detail temporal yang spesifik namun tetap dalam batas wajar. Dalam *statement validity analysis* (SVA), salah satu indikator kejujuran adalah *contextual embedding*—yaitu keberadaan rincian konteks yang secara alami terintegrasi dalam cerita. Dalam hal ini, informasi mengenai status kepegawaian petugas sebagai “anak baru” yang diangkat menjadi PNS pada rentang waktu tertentu mencerminkan adanya integrasi konteks yang realistis, yang memperkuat kesan bahwa narasi disampaikan secara alami dan tanpa rekayasa.

Selain itu, pernyataan “Kami sudah memeriksa petugas itu” menunjukkan upaya pembicara untuk menghadirkan legitimasi institusional terhadap pernyataan yang disampaikan. Dalam wacana publik, rujukan terhadap proses investigatif formal seperti ini berfungsi sebagai strategi retorik untuk membangun kepercayaan dan memperkuat posisi sebagai otoritas yang bertindak objektif. Kalimat penutup “Kesimpulannya, dia sudah memenuhi prosedur” bersifat deklaratif dan final, memperlihatkan keyakinan serta konsistensi posisi yang disampaikan.

Meskipun narasi ini secara pragmatik dimaksudkan sebagai pembelaan, namun tidak ditemukan adanya *language indicators* yang lazimnya diasosiasikan dengan kebohongan, seperti penghindaran tanggung jawab, ketidakkonsistenan referensial, atau upaya pengaburan informasi. Oleh karena itu, berdasarkan prinsip-prinsip analisis linguistik forensik, pernyataan Yasonna ini dapat diklasifikasikan sebagai memiliki tingkat kejujuran tinggi, karena didukung oleh struktur naratif yang logis, penggunaan rincian faktual yang proporsional, dan absennya indikasi linguistik manipulatif.

Berdasarkan hasil analisis kutipan narasi tokoh publik di atas berdasarkan aspek *narrative structure*, dapat disimpulkan bahwa kejujuran berbahasa dalam wacana publik sangat dipengaruhi oleh koherensi struktur naratif, konsistensi penggunaan pronomina, dan keberadaan rincian kontekstual yang logis. Pada data pertama, ditemukan indikasi rendahnya tingkat kejujuran yang tercermin melalui ketidakkonsistenan referensial serta ketidakjelasan sumber informasi, yang membuka kemungkinan adanya konstruksi naratif yang manipulatif. Sebaliknya, pada data kedua, narasi disusun secara sistematis dan logis, dilengkapi dengan

rincian temporal yang realistis serta pernyataan institusional yang memperkuat kredibilitas, sehingga mencerminkan tingkat kejujuran yang tinggi. Dengan demikian, pendekatan linguistik forensik memungkinkan kita untuk mengidentifikasi secara objektif unsur-unsur kebahasaan yang berpotensi merefleksikan ketulusan atau rekayasa dalam ujaran tokoh publik..

Kejujuran Berbahasa Berdasarkan Aspek Sequence of Events

Aspek kedua yang dianalisis adalah *sequence of events*, yakni bagaimana narator menyusun peristiwa secara kronologis dan logis. Olsson (2008) menyebutkan bahwa narasi yang jujur cenderung memiliki alur waktu yang runtut, tanpa sisipan atau distorsi yang tidak relevan.

Dalam artikel Majalah *Tempo* berjudul *Bohong jika Pemerintah Tak Tahu Djoko Tjandra di Malaysia* (11 Juli 2020), narasi yang disampaikan oleh Anita Kolopaking mengenai proses pembuatan paspor DT menunjukkan kejanggalan. Penyangkalan tersebut dapat dilihat dalam data berikut.

Data 3

“Beliau datang sendiri ke kelurahan dan kantor Imigrasi Jakarta Utara. Tapi paspor itu jadi ketika Pak Djoko sudah pulang ke Malaysia. Paspor itu dikirim ke rumahnya, lalu ada utusan Pak Djoko yang menyerahkan kepada saya. Saya terima dan mengembalikan dokumen itu ke Kantor Direktorat Jenderal Imigrasi di Jalan Rasuna Said, Jakarta.”

Pernyataan yang disampaikan oleh Anita dalam narasi ini memperlihatkan struktur tuturan yang kompleks dan cenderung berbelit, yang dalam *linguistik forensik* sering kali dikaitkan dengan upaya pengaburan informasi atau *obfuscation*. Pernyataan awal *“Beliau datang sendiri ke kelurahan dan kantor Imigrasi Jakarta Utara”* secara eksplisit dimaksudkan untuk menegaskan bahwa kliennya, DT, melakukan proses permohonan paspor secara mandiri, tanpa keterlibatan langsung dari Anita. Namun, kejelasan naratif mulai melemah ketika Anita menjelaskan urutan peristiwa selanjutnya: paspor selesai saat DT telah kembali ke Malaysia, kemudian dikirim ke rumahnya, lalu diserahkan oleh utusan kepada Anita, dan akhirnya dikembalikan ke kantor imigrasi. Struktur narasi semacam ini menimbulkan *cognitive overload* bagi pendengar karena menampilkan serangkaian rincian tambahan yang tampaknya tidak proporsional terhadap pertanyaan awal, yakni seputar keterlibatan langsung dalam proses pembuatan paspor.

Dalam konteks analisis kejujuran berbahasa, kemunculan detail yang berlebihan dan berputar-putar dapat menjadi indikator dari *deceptive discourse*, khususnya ketika rincian tersebut tidak relevan secara langsung terhadap inti pertanyaan. Selain itu, urutan kronologis yang tidak linier dan terlalu kompleks dapat menunjukkan adanya upaya rekonstruksi peristiwa secara artifisial, sehingga memunculkan keraguan terhadap keabsahan narasi. Di sisi lain, penyebutan pihak ketiga seperti *“utusan Pak Djoko”* yang tidak diidentifikasi secara jelas juga memperlemah kredibilitas narasi, karena membuka kemungkinan pengalihan tanggung jawab secara implisit.

Dalam *statement analysis*, strategi semacam ini sering dikategorikan sebagai *narrative distancing*, yaitu ketika penutur dengan sengaja memperpanjang jarak naratif antara dirinya dan peristiwa utama untuk menghindari keterikatan langsung terhadap suatu tindakan. Oleh karena itu, berdasarkan kompleksitas struktur naratif, inkonsistensi fokus tematik, serta penggunaan rincian yang tidak relevan secara langsung, dapat disimpulkan bahwa pernyataan ini menunjukkan tingkat kejujuran yang rendah, khususnya dalam aspek koherensi dan relevansi informasi terhadap pertanyaan utama.

Selanjutnya, dalam artikel yang sama, Anita menyangkal telah membantu DT untuk bersembunyi dari aparat hukum. Penyangkalan tersebut dapat dilihat dalam data berikut.

Data 4

“Di mana saya menyembunyikan beliau? Saya Cuma diminta Pak Djoko mengecek apakah data kependudukannya masih aktif atau tidak. Setelah saya telepon kelurahan, ternyata masih aktif dan diminta datang untuk foto. Saya sampaikan informasi ini kepada Pak Djoko. Apakah saya salah kalau Cuma menanyakan informasi itu? Saya tidak mengurus berkas sama sekali.”

Pernyataan Anita Kolopaking dalam kutipan ini merupakan bentuk *defensive narrative* yang secara eksplisit berupaya membantah keterlibatannya dalam membantu Djoko Tjandra. Ia memulai dengan pertanyaan retorik “Di mana saya menyembunyikan beliau?” yang secara pragmatik berfungsi sebagai strategi pengalihan (*deflection*) dan penolakan awal terhadap tuduhan, sebelum memberikan penjelasan lebih lanjut. Penggunaan bentuk retorik ini, dalam konteks linguistik forensik, kerap dimaknai sebagai sinyal adanya tekanan psikologis dalam menyampaikan narasi, sekaligus sebagai usaha untuk mengontrol persepsi publik sejak awal.

Lebih lanjut, Anita menyatakan bahwa dirinya “hanya diminta mengecek data kependudukan” dan menegaskan bahwa ia “tidak mengurus berkas sama sekali.” Pernyataan ini, jika dilihat secara sekilas, tampak logis dan wajar. Namun, secara diskursif, terdapat indikasi *overjustification*—yakni penyajian informasi yang tidak diminta secara eksplisit oleh penanya. Dalam konteks wawancara atau klarifikasi publik, pernyataan yang menjawab lebih dari yang ditanyakan dapat mengindikasikan *guilty knowledge* atau kesadaran akan informasi sensitif yang berusaha disembunyikan. Dalam hal ini, pernyataan “Saya tidak mengurus berkas sama sekali” menjadi mencurigakan karena tidak relevan langsung dengan konteks pertanyaan, yang justru memperlihatkan *verbal leakage* atau kebocoran linguistik dari informasi yang ingin ditekan.

Di samping itu, narasi Anita juga mencerminkan ciri *self-distancing*, yaitu upaya penutur untuk menjaga jarak naratif dari tindakan atau peristiwa yang berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum. Hal ini tampak dari pilihan diksi seperti “saya cuma diminta” dan “saya hanya menanyakan”, yang menempatkan dirinya sebagai aktor pasif. Strategi ini umum digunakan dalam diskursus penyangkalan dan sering kali menjadi indikator kejujuran yang diragukan dalam analisis linguistik forensik, karena mencerminkan konstruksi narasi yang terkesan disengaja untuk menciptakan kesan tidak bersalah.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa meskipun secara struktural narasi tampak koheren, kehadiran informasi yang tidak ditanyakan secara langsung, penggunaan pertanyaan retorik yang bersifat mengelak, serta strategi pelibatan diri yang minimal dalam struktur kalimat, semuanya mengarah pada indikasi tingkat kejujuran yang rendah. Narasi ini, dengan demikian, menunjukkan adanya kemungkinan penyangkalan strategis terhadap keterlibatan faktual dalam proses administratif terkait perkara Djoko Tjandra.

Berdasarkan analisis berdasarkan aspek *sequence of events*, dapat disimpulkan bahwa kedua narasi yang disampaikan oleh Anita Kolopaking mengandung sejumlah indikasi linguistik yang mencerminkan rendahnya tingkat kejujuran berbahasa. Pada data ketiga, keterlibatan Anita dalam proses penerbitan paspor digambarkan melalui urutan peristiwa yang berbelit dan tidak linier, yang justru memperkuat dugaan keterlibatannya meskipun secara verbal ia menyangkalnya. Sementara itu, pada data keempat, narasi penyangkalan ditandai oleh kehadiran informasi yang tidak ditanyakan secara eksplisit—khususnya terkait pengurusan berkas—yang menunjukkan adanya *verbal leakage* dan upaya defensif untuk menutupi keterlibatan aktual. Kedua pernyataan ini menunjukkan adanya konstruksi naratif yang cenderung manipulatif, yang secara pragmatis bertujuan membentuk citra diri non-terlibat, namun justru menyingkap potensi kebohongan melalui ciri-ciri kebahasaan yang tidak konsisten dan berlebihan.

Kejujuran Berbahasa Berdasarkan Aspek Association of Narrator with Events

Aspek ketiga dalam model SAL adalah *association of narrator with events*, yang menunjukkan sejauh mana narator mengaitkan dirinya dengan peristiwa yang diceritakan. Menurut Olsson (2008), narasi yang jujur biasanya ditandai oleh keterlibatan narator secara personal, penggunaan bentuk lampau, dan rincian yang relevan.

Dalam artikel *Saya Tidak Pernah Berpikir Menjadi Kapolri* (Tempo, 22 Agustus 2020), narasi dari Listyo Sigit Prabowo menunjukkan keterlibatan pribadi dalam menjelaskan posisinya. Ia menggunakan bentuk “saya” dan mengaitkan keputusan atau tindakan dengan perannya secara langsung. Narasi seperti ini menunjukkan *high speaker commitment* dan merupakan ciri dari narasi yang jujur. Penyangkalan tersebut dapat dilihat dalam data berikut.

Data 5

“*Saya juga sempat menanyakan ini ke Pak Prasetyo. Kalau memang dianggap teman saya, apakah pernah dikonfirmasi kepada saya bahwa saya memerintahkan untuk membantu urusan ini? sama sekali tidak ada obrolan dengan saya. Saya juga tidak pernah memerintahkan untuk membantu urusan seperti ini. Pak Pras sudah kenal lama dengan yang bersangkutan. Buat apa kami tangkap DT (Djoko Tjandra), Brigjen PU (Prasetyo Utomo), dan Irjen NP (Napoleon Bonaparte)? Ini kan untuk membuat terang yang terjadi. Kenapa saya ajak Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mensupervisi dan ikut gelar perkara kalau ada yang saya tutupi? Pak Kapolri Jenderal Idham Azis juga pertanyaannya keras bahwa kejadian seperti ini jangan sampai terulang.*”

Pernyataan yang disampaikan oleh Listyo Sigit Prabowo dalam kutipan di atas memperlihatkan struktur naratif yang koheren dan tersusun secara logis, serta tidak menunjukkan ciri-ciri linguistik khas dari wacana yang bersifat manipulatif atau menyesatkan. Penyangkalan dilakukan dengan pendekatan argumentatif yang rasional, di mana Listyo menegaskan bahwa tidak pernah ada komunikasi atau instruksi dari dirinya terkait keterlibatan dalam kasus Djoko Tjandra. Frasa seperti “*sama sekali tidak ada obrolan dengan saya*” dan “*saya juga tidak pernah memerintahkan*” menunjukkan bentuk penyangkalan langsung (*direct denial*) yang dalam kerangka linguistik forensik mengindikasikan keterusterangan apabila tidak disertai dengan gejala linguistik yang mencurigakan.

Lebih lanjut, argumen yang dibangun melalui pertanyaan retorik “*buat apa kami tangkap DT, Brigjen PU, dan Irjen NP?*” menunjukkan strategi retorik untuk memperkuat kredibilitas narasi, tetapi tidak terkesan sebagai bentuk pengalihan (*deflection*) atau penyangkalan yang defensif. Hal ini diperkuat dengan referensi terhadap tindakan konkret seperti melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan mengikutsertakan dalam gelar perkara. Penyebutan lembaga dan pejabat tinggi lain seperti Kapolri Jenderal Idham Azis juga memperlihatkan penggunaan sumber otoritatif untuk mendukung klaim kejujuran (*appeal to authority*), namun dilakukan secara proporsional dan tidak berlebihan.

Dalam aspek pragmatik, tidak terdapat indikasi *verbal leakage*, *overjustification*, maupun upaya *self-distancing* yang biasanya muncul dalam narasi yang mengandung penipuan atau upaya menutupi informasi. Sebaliknya, narasi ini memperlihatkan konsistensi tematik, kesesuaian konteks, serta struktur diskursif yang linier dan berorientasi pada transparansi. Oleh karena itu, berdasarkan karakteristik kebahasaan tersebut, dapat disimpulkan bahwa penyangkalan yang disampaikan oleh Listyo mengandung tingkat kejujuran yang tinggi, dengan narasi yang dibangun secara koheren, terbuka, dan tidak menunjukkan upaya pengaburan makna atau manipulasi informasi.

Selanjutnya, beberapa narasi dari Listyo juga tampak keterlibatan pribadi dalam menjelaskan posisinya. Struktur kalimat seperti ini menunjukkan kecenderungan narator untuk melibatkan diri dalam peristiwa. Pengakuan tersebut dapat dilihat dalam data berikut.

Data 6

“Saya mengenal yang bersangkutan. Tapi yang bersangkutan juga banyak sekali kenal orang di Polri karena memang lama bergaul dengan teman teman di Polri.”

Pernyataan yang disampaikan oleh Listyo Sigit Prabowo dalam data keenam menunjukkan bentuk pengakuan terbatas (*partial admission*) yang dikombinasikan dengan strategi *contextual distancing*. Ia mengakui mengenal tokoh yang disebutkan, yakni Tommy Sumardi, namun segera menambahkan informasi bahwa “yang bersangkutan juga banyak sekali kenal orang di Polri.” Pernyataan ini secara pragmatik dimaksudkan untuk menetralkan atau menurunkan intensitas hubungan personal antara dirinya dan pihak yang disebut, serta menunjukkan bahwa relasi tersebut tidak eksklusif. Dalam kajian linguistik forensik, strategi semacam ini dikenal sebagai *neutralization*, yaitu ketika seorang penutur mengakui sebagian informasi faktual untuk memberi kesan keterbukaan, namun sekaligus menjaga jarak terhadap hal-hal yang berpotensi merugikan secara hukum atau reputasional.

Dari sisi struktur wacana, narasi Listyo tergolong ringkas, lugas, dan tidak mengandung deskripsi yang berlebihan. Tidak terdapat indikasi *overjustification* ataupun *verbal leakage*, yang sering muncul dalam narasi dengan niat menyembunyikan informasi. Pemilihan diksi seperti “banyak sekali kenal orang di Polri” juga berfungsi untuk merelatifkan hubungan personal yang dimiliki, sehingga tidak mengarah pada keterlibatan langsung. Secara sintaksis, penggunaan struktur kalimat majemuk koordinatif memperlihatkan kesan narasi yang rasional dan tidak emosional, yang dalam konteks forensik menunjukkan tingkat tekanan psikologis yang rendah.

Lebih jauh, pernyataan ini juga tidak memperlihatkan pola penyangkalan defensif seperti penggunaan pertanyaan retorik, penekanan emosional, atau pernyataan hiperbolik yang sering menjadi penanda narasi dengan integritas yang meragukan. Oleh karena itu, berdasarkan analisis kebahasaan yang tersedia, narasi yang disampaikan Listyo dalam data ini dapat dikategorikan memiliki tingkat kejujuran tinggi, karena menunjukkan konsistensi, kesederhanaan, dan orientasi informatif tanpa indikasi manipulasi atau distorsi makna.

Berdasarkan analisis aspek *association of narrator with events*, dapat disimpulkan bahwa pernyataan yang disampaikan oleh Listyo Sigit Prabowo menunjukkan tingkat kejujuran yang tinggi. Kedua narasi tersebut disusun secara logis, ringkas, dan tidak mengandung indikasi linguistik yang biasa muncul dalam wacana yang bersifat manipulatif, seperti justifikasi berlebihan, pengalihan isu, atau *verbal leakage*. Pada data kelima, Listyo membangun penyangkalan yang kuat melalui argumen rasional dan penggunaan referensi otoritatif tanpa menunjukkan kecenderungan defensif yang mencolok. Sementara itu, pada data keenam, ia menggunakan strategi netralisasi untuk menjaga jarak dari tokoh yang disebutkan, namun tetap menyampaikan informasi secara terbuka dan proporsional. Konsistensi, keterusterangan, dan tidak adanya tekanan emosional dalam kedua narasi memperkuat dugaan bahwa pernyataan tersebut disampaikan secara jujur dan faktual dalam konteks wacana publik.

Interpretasi Temuan dan Diskusi Teoretis

Berdasarkan hasil analisis terhadap kutipan narasi tokoh publik dalam Majalah *Tempo*, ditemukan adanya variasi tingkat kejujuran berbahasa yang dapat ditelusuri melalui ciri-ciri linguistik forensik. Pada narasi yang disampaikan oleh Anita Kolopaking, tampak adanya ketidakkonsistenan penggunaan pronomina, urutan peristiwa yang berbelit-belit, serta kehadiran informasi yang tidak relevan dengan pertanyaan utama. Ciri-ciri tersebut mengindikasikan adanya *verbal leakage* dan *overjustification*, dua indikator penting dalam teori kebohongan linguistik (Vrij, 2008), yang mengarah pada rendahnya tingkat kejujuran dalam pernyataan tersebut. Strategi retorik seperti penghindaran langsung terhadap substansi tuduhan dan penyisipan informasi yang tidak diminta menunjukkan adanya usaha manipulatif

untuk membangun narasi pembelaan yang tidak sepenuhnya transparan.

Sebaliknya, pernyataan yang disampaikan oleh Listyo Sigit Prabowo serta Yasonna Laoly menunjukkan struktur naratif yang relatif stabil, logis, dan bebas dari indikasi linguistik yang mencurigakan. Tidak ditemukan adanya deskripsi yang berlebihan, pembelaan yang tidak relevan, ataupun pengalihan fokus dalam narasi mereka. Ini sejalan dengan teori *truth-default* oleh Levine (2020), yang menjelaskan bahwa pernyataan yang cenderung jujur biasanya ditandai oleh struktur kalimat yang ringkas, langsung, dan minim beban kognitif. Dalam konteks ini, penggunaan diksi yang netral serta koherensi antar kalimat menjadi indikator kebahasaan penting yang memperkuat keabsahan narasi dan mengimplikasikan tingkat kejujuran yang tinggi dalam komunikasi publik mereka.

Secara teoretis, temuan ini mengonfirmasi bahwa analisis linguistik forensik, khususnya melalui pendekatan pragmatik dan stilistika naratif, dapat digunakan untuk mendeteksi ketidakjujuran secara implisit dalam wacana publik. Perbedaan mencolok antara narasi yang manipulatif dan narasi yang jujur terlihat dari keberadaan indikator linguistik seperti *self-repair*, pronomina ambigu, struktur kalimat kompleks yang tidak relevan, serta justifikasi yang tidak diminta. Dengan demikian, kejujuran berbahasa dalam konteks forensik tidak hanya dapat ditinjau dari isi pernyataan, tetapi juga dari bagaimana pernyataan tersebut dikonstruksi secara kebahasaan. Hal ini membuktikan bahwa bahasa bukan hanya sarana penyampai informasi, tetapi juga refleksi dari strategi mental dan niat komunikatif pembicara dalam situasi sosial tertentu.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa analisis linguistik forensik dapat menjadi instrumen yang efektif dalam mengidentifikasi tingkat kejujuran berbahasa tokoh publik melalui narasi yang disampaikan kepada media. Melalui pendekatan analitis terhadap enam data dari Majalah *Tempo*, ditemukan bahwa bentuk kebahasaan seperti struktur kalimat, pilihan pronomina, urutan logis peristiwa, dan kehadiran informasi yang tidak relevan sangat berpengaruh terhadap persepsi kejujuran dalam ujaran. Data yang dianalisis mengindikasikan bahwa narasi dengan tingkat kejujuran rendah cenderung mengandung elemen kebahasaan manipulatif, seperti justifikasi berlebihan, penghindaran langsung terhadap inti pertanyaan, serta inkonsistensi dalam penyebutan identitas tokoh. Sebaliknya, narasi dengan tingkat kejujuran tinggi ditandai oleh struktur bahasa yang ringkas, konsisten, dan fokus pada informasi relevan.

Temuan ini mempertegas bahwa kejujuran dalam komunikasi bukan hanya dapat ditelusuri melalui isi pernyataan, tetapi juga melalui cara pernyataan itu dibangun secara linguistik. Dalam konteks ini, teori *truth-default* dan indikator kebohongan linguistik memberikan landasan kuat dalam menganalisis strategi bahasa yang digunakan untuk menyampaikan atau menyembunyikan informasi. Pendekatan ini membuka ruang baru dalam kajian linguistik forensik, khususnya dalam pengawasan terhadap narasi elite publik yang berdampak luas terhadap opini masyarakat dan kepercayaan publik terhadap institusi negara.

Sebagai penutup, penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi awal dalam pemanfaatan linguistik forensik sebagai alat kritis untuk membedah wacana kekuasaan dan transparansi. Analisis terhadap kejujuran berbahasa para tokoh publik tidak hanya penting dalam konteks akademik, tetapi juga dalam membentuk budaya komunikasi yang akuntabel di ruang publik. Studi lanjutan disarankan untuk memperluas cakupan data serta melibatkan metode triangulasi dengan pendekatan psikolinguistik dan wacana kritis untuk memperkaya pemahaman terhadap strategi bahasa dalam praktik komunikasi kekuasaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anis, E. (2016). *Analisis penyangkalan tokoh publik Indonesia dalam kasus Panama Papers: Kajian linguistik forensik* [Skripsi, Universitas Negeri Jakarta].
- Asmara, G. (2020). *Naratif dan struktur naratif dalam novel Indonesia modern*. Malang: CV Literasi Nusantara.
- Baldick, C. (2008). *The Oxford dictionary of literary terms* (3rd ed.). Oxford University Press.
- Bordwell, D., & Thompson, K. (2004). *Film art: An introduction* (7th ed.). McGraw-Hill.
- Coulthard, M., Johnson, A., & Wright, D. (2016). *An introduction to forensic linguistics: Language in evidence* (2nd ed.). Routledge.
- Hasin, A. (n.d.). *Analisis wacana forensik terhadap pengakuan siswa pelanggar tata tertib sekolah* [Skripsi, Universitas Negeri Jakarta].
- Levine, T. R. (2020). *Duped: Truth-default theory and the social science of lying and deception*. University of Alabama Press.
- Mahsun. (2018). *Metode penelitian bahasa: Tahapan strategi, metode, dan tekniknyanya*. Rajawali Pers.
- Media, T. (2020a–2020e). Artikel-artikel dalam Majalah *Tempo* edisi Juli–Agustus 2020.
- Muttaqin, M. I., & Wijaya, H. (2019). Kejujuran komunikasi dosen dan mahasiswa: Telaah prinsip kerja sama Grice. *Bahtera Indonesia*, 4(2), 125–137.
- Noortyani, I. (2016). *Unsur naratif dalam cerita rakyat Jawa Timur*. Surabaya: Airlangga Press.
- Olsson, J. (2008). *Forensic linguistics: Second edition*. Continuum.
- Olsson, J., & Luchjenbroers, J. (2014). *Forensic linguistics*. Bloomsbury.
- Pratista, H. (2008). *Memahami film*. Homerian Pustaka.
- Rahmat, R. (2017). *Linguistik forensik: Konsep dan aplikasinya dalam ranah hukum*. Jakarta: PT Prenadamedia Group.
- Sholihatin, E. (2019). Bahasa dan kekuasaan dalam praktik linguistik forensik. *Jurnal Bahasa dan Hukum*, 7(1), 45–60.
- Silalahi, A. (n.d.). *Implikatur percakapan dalam interogasi anak pelaku pidana* [Skripsi, Universitas Negeri Jakarta].
- Subyantoro, A. (2019). *Linguistik forensik: Konsep, teori dan aplikasinya*. Semarang: UNNES Press.
- Susanto, M., & Nanda, R. (2020). *Linguistik forensik dan relevansinya dalam penegakan*

hukum. *Jurnal Bahasa dan Hukum*, 8(2), 98–110.

Vrij, A. (2008). *Detecting lies and deceit: Pitfalls and opportunities* (2nd ed.). John Wiley & Sons.

Waljinah. (2016). *Implikatur percakapan dalam interogasi hukum di kepolisian* [Skripsi, Universitas Negeri Jakarta].